

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP PEMBENTUKAN
KOMITE MANAJEMEN RISIKO**
(Studi Empiris Pada Perusahaan Finansial Non Perbankan yang
Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

GEA FATAH SAMBERA

NIM. C2C009125

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Gea Fatah Sambera

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009125

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Juduk Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
DEWAN KOMISARIS DAN
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP PEMBENTUKAN KOMITE
MANAJEMEN RISIKO (Studi Empiris Pada
Perusahaan Finansial Non Perbankan yang
Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)**

Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 13 Juni 2013

Dosen Pembimbing,

(Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 19760522 200312 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Gea Fatah Sambera

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009125

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
DEWAN KOMISARIS DAN
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP PEMBENTUKAN KOMITE
MANAJEMEN RISIKO (Studi Empiris Pada
Perusahaan Finansial Non Perbankan yang
Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2013

Tim Penguji :

1. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt (.....)
2. Dr. H. Rahardja, M.Si., Akt (.....)
3. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Gea Fatah Sambera, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pembentukan Komite Manajemen Risiko**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas, batal saya terima.

Semarang, 5 Juni 2013

Yang membuat pernyataan,

(Gea Fatah Sambera)

NIM. C2C009125

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain
(Rasulullah SAW)*

*Setiap kamu punya mimpi atau keinginan atau cita-cita, kamu letakkan di sini, di
depan kening kamu jangan menempel, biarkan dia MENGGANTUNG,
MENGAMBANG 5 cm di depan kening kamu, jadi dia tidak akan pernah lepas
dari mata kamu (Donny Dhirgantoro)*

PERSEMBAHAN :

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Ibu, Ayah, Angga dan Adekku Nada tercinta
Atas kasih sayang kepadaku yang tak terhingga*

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board of commissioner characteristics and firm characteristics to the establishment of Risk Management Committee (RMC) in financial non bank firms. Establishment of Risk Management Committee in question is the existence of RMC in the company, whether affiliated with audit committee or separated from the audit committee and independent. Board of commissioner characteristics used in this research are proportion of independent commissioner, board size, and frequency of meetings. While the firm characteristics used in this research are financial reporting risk, leverage and business complexity, and firm size as control variable.

Sample of this research were financial non bank firms listed in Indonesia Stock Exchange for the observation period from 2009 until 2011. Collecting data in this research used a purposive sampling method and resulted 57 samples. This research used logistic regression to analyze data.

Result of this research showed that financial reporting risk affected positively and significant to the establishment both of affiliated RMC and Separated RMC and business complexity affected positively and significant to the establishment of affiliated RMC. While firm size as control variable had positive and significant impact to the establishment of affiliated RMC and Separated RMC.

Keywords: corporate governance, risk management committee, board of commissioner characteristics, firm characteristics

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko (RMC) pada perusahaan finansial non perbankan. Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang dimaksud adalah pembentukan RMC di dalam perusahaan, apakah tergabung dengan Komite Audit atau terpisah dari Komite Audit dan berdiri sendiri. Karakteristik Dewan Komisaris yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, dan frekuensi rapat Dewan Komisaris. Sedangkan karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko pelaporan keuangan, proporsi utang jangka panjang dan kompleksitas perusahaan, dan ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian dari tahun 2009 sampai 2011. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 57 sampel. Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pelaporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang terpisah dari Komite Audit dan kompleksitas perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit. Sedangkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang terpisah dari Komite Audit.

Kata Kunci: tata kelola perusahaan, komite manajemen risiko, karakteristik dewan komisaris, karakteristik perusahaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO”** dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Much. Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan saran, dukungan, nasihat, bimbingan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama studi penulis.
6. Ibunda Siti Handayani dan Ayahanda Purwoko Hurin Suparwanto atas cinta, doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga suatu saat nanti penulis bisa membahagiakan kalian berdua.
7. Gea Rafdan Anggana, seseorang yang selalu menemani dan memberikan penulis semangat sejak di rahim bunda hingga sekarang, semoga Allah selalu memberkahimu, dan Gea Nada Aderangga, adek yang selalu memberikanku pelajaran hidup setiap harinya, semoga kelak adek menjadi anak yang sholehah dan sukses.
8. Noviasari Dewi Eka Purwanto, yang selalu memberikan cinta, dukungan, nasihat dan mengajarkan kesabaran setiap hari kepada penulis, semoga Allah selalu menyayangimu.
9. Sahabat-sahabat terbaikku selama 4 tahun : Chandra, Sidik, Willyza, Tami, Wika, Tya dan Konny. Terima kasih untuk perjalanan selama 4 tahun ini, dari kalian aku belajar menapaki hidup.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi, Mayco, Anis, Husni, Alex, Ridho, Ivan, Putu, Mahe dan Domi. Terima kasih untuk semua bantuan kalian selama ini, semoga kalian menjadi orang yang sukses.
11. Teman-teman Akuntansi 2009. Terima kasih atas kenangan indahnyanya selama 4 tahun ini. Selamat melanjutkan hidup dan meniti karir kalian masing-masing.

12. Teman-teman AIESEC. Terima kasih atas segala pelajaran hidup selama 3 tahun ini, penulis percaya bahwa setiap kenangan manis dan pahit selama ada di *platform* ini dapat menjadi bekal yang sangat berharga untuk masa depan.
13. Teman-teman Future Leader Summit 2013. Terima kasih untuk saran dan dukungannya selama ini, dan juga kesempatan serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
14. Teman-teman KKN Tanjung Anom : Mas Andri, Mas Ryan, Yosandra, Mbak Dewi, Saras dan Diana. Terima kasih telah menjadi teman baik dan keluarga selama 35 hari pengabdian hingga sekarang, semoga kalian selalu dinaungi rahmat Allah.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat digunakan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Semarang, 5 Juni 2013

Penulis,

Gea Fatah Sambera

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	14
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Keagenan	16
2.1.2 Risiko.....	19
2.1.3 Manajemen Risiko.....	21
2.1.4 Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Management Committee</i>)	22
2.1.5 Karakteristik Dewan Komisaris	26

2.1.5.1	Komisaris Independen.....	26
2.1.5.2	Ukuran Dewan Komisaris	28
2.1.5.3	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	29
2.1.6	Karakteristik Perusahaan	30
2.1.6.1	Risiko Pelaporan Keuangan.....	30
2.1.6.2	<i>Leverage</i>	31
2.1.6.3	Kompleksitas	32
2.1.6.4	Ukuran Perusahaan	32
2.2	Penelitian Terdahulu	33
2.3	Kerangka Pemikiran.....	37
2.4	Pengembangan Hipotesis	41
2.4.1	Komisaris Independen dengan Pembentukan RMC.....	41
2.4.2	Ukuran Dewan dengan Pembentukan RMC	42
2.4.3	Frekuensi Rapat dengan Pembentukan RMC	44
2.4.4	Risiko Pelaporan Keuangan dengan Pembentukan RMC .	45
2.4.5	<i>Leverage</i> dengan Pembentukan RMC	46
2.4.6	Kompleksitas dengan Pembentukan RMC	47
BAB III	METODE PENELITIAN	48
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
3.1.1	Variabel Penelitian	48
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	49
3.2	Populasi dan Sampel	54
3.2.1	Populasi Penelitian	54
3.2.2	Sampel Penelitian	54
3.3	Jenis dan Sumber Data	54
3.4	Metode Pengumpulan Data	55
3.5	Metode Analisis	55
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	55
3.5.2	Uji Hipotesis	56
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	61

4.2	Statistik Deskriptif	62
4.2.1	Statistik Deskriptif Variabel Proporsi Komisaris Independen (NONEXEDIR)	64
4.2.2	Statistik Deskriptif Variabel Ukuran Dewan Komisaris (BOARDSIZE).....	64
4.2.3	Statistik Deskriptif Variabel Rapat Dewan Komisaris (BOARDMEET).....	65
4.2.4	Statistik Deskriptif Variabel Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP)	65
4.2.5	Statistik Deskriptif Variabel Proporsi Hutang Jangka Panjang (LEV)	66
4.2.6	Statistik Deskriptif Variabel Kompleksitas Perusahaan (BUSSEMENT).....	66
4.3	Analisis Data	67
4.3.1	Uji Multikolinieritas.....	67
4.3.2	Uji Kelayakan Model Regresi (<i>Goodness of Fit Test</i>).....	68
4.3.3	Uji Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>).....	70
4.3.4	Koefisien Determinasi.....	71
4.3.5	Matriks Klasifikasi.....	73
4.3.6	Uji Koefisien Regresi.....	75
4.4	Uji Hipotesis	77
4.4.1	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC.....	77
4.4.2	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan SRMC.....	77
4.4.3	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC.....	78
4.4.4	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan SRMC	78
4.4.5	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	

	terhadap Pembentukan RMC	78
4.4.6	Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pembentukan SRMC	79
4.4.7	Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap Pembentukan RMC.....	79
4.4.8	Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap Pembentukan SRMC	80
4.4.9	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pembentukan RMC.....	80
4.4.10	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pembentukan SRMC.....	80
4.4.11	Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap Pembentukan RMC.....	81
4.4.12	Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap Pembentukan SRMC	81
4.5	Pembahasan.....	82
4.5.1	Karakteristik Dewan Komisaris	82
4.5.1.1	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dengan Pembentukan <i>Risk Management Committee</i>	82
4.5.1.2	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dengan Pembentukan <i>Risk Management Committee</i>	83
4.5.1.3	Pengaruh Frekuensi Rapat dengan Pembentukan <i>Risk Management Committee</i>	84
4.5.2	Karakteristik Perusahaan	85
4.5.2.1	Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan dengan Pembentukan <i>Risk Management Committee</i>	85
4.5.2.2	Pengaruh <i>Leverage</i> dengan Pembentukan <i>Risk Management Committee</i>	86
4.5.2.3	Pengaruh Kompleksitas Perusahaan dengan Pembentukan <i>Risk Management Committee</i>	86
BAB V	PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	90

5.2.1 Keterbatasan Penelitian	90
5.2.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria	62
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.3	Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.4	Uji Hosmer and Lemeshow Model Regresi I.....	69
Tabel 4.5	Uji Hosmer and Lemeshow Model Regresi Ia.....	69
Tabel 4.6	Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir	70
Tabel 4.7	Nilai Nagelkerke R Square Model Regresi I.....	71
Tabel 4.8	Nilai Nagelkerke R Square Model Regresi Ia.....	72
Tabel 4.9	Matriks Klasifikasi Model Regresi I.....	73
Tabel 4.10	Matriks Klasifikasi Model Regresi Ia.....	74
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model I	75
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model Ia.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran I	39
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran II	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Nama Perusahaan	96
Lampiran B	Output SPSS.....	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai akibat dari kejadian runtuhnya beberapa perusahaan di AS yang terjadi karena penipuan maupun kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor dan kreditor dalam pelaporan akuntansi seperti pada kasus perusahaan Enron dan Worldcom beberapa tahun yang lalu, membuat perusahaan-perusahaan yang ada mencoba berinisiatif untuk meningkatkan *corporate governance* dengan cara meningkatkan perhatiannya pada pengelolaan manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Sampai saat ini, selain berfokus pada risiko yang mengancam profitabilitasnya, perusahaan juga harus mempertimbangkan berbagai risiko lain yang mengancam pembentukan perusahaan. Lingkungan perusahaan yang berkembang pasti juga mengakibatkan risiko bisnis perusahaan yang semakin kompleks yang harus dihadapi oleh perusahaan.

Risiko adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran organisasi. Salah satu atribut risiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari sesuatu yang belum diketahui (KNKG, 2011). Risiko yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya risiko finansial dari pelaporan akuntansi, akan tetapi bisa juga muncul risiko bisnis dan risiko operasional yang menambah kompleksitas perusahaan. Oleh karena itu, saat ini sangatlah diperlukan suatu pengelolaan risiko atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko (*risk*

management). Sistem manajemen risiko yang efektif dapat dipandang sebagai suatu keunggulan yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Sistem manajemen risiko yang efektif juga berperan dalam menciptakan nilai bagi para *stakeholder* (COSO, 2004). Lebih jauh lagi, manajemen risiko tidak seharusnya dipandang sebagai penghindaran risiko atau pengeliminasian risiko. Akan tetapi, manajemen risiko seharusnya dipandang sebagai suatu proses dalam menjamin apakah suatu perusahaan mengambil risiko secara bertanggung jawab dengan menyeimbangkan biaya dan keuntungan yang berhubungan dengan risiko yang ada (Krus dan Orowitz, 2009).

Pada tahun 2004, *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menerbitkan suatu model dari proses *Enterprise Risk Management*, dimana model ERM ini merupakan suatu proses yang sistematis yang mengikutsertakan jajaran direksi dan manajemen senior untuk bisa mengerti dan mengantisipasi kejadian-kejadian di masa depan yang dapat memberikan efek kepada perusahaan secara strategis (Yatim, 2009). Sedangkan di Australia, Dewan Tata Kelola Perusahaan dari *Australian Stock Exchange* (ASX) telah menetapkan suatu peraturan dan panduan untuk manajemen risiko bagi berbagai organisasi dan perusahaan yang telah *listing* dan jajaran dewan dipandang sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap pembentukan dan pengimplementasian sistem manajemen risiko yang cocok bagi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Subramaniam *et al.* (2009) menjelaskan bahwa komite pengawas adalah suatu mekanisme yang sangat efisien untuk memfokuskan perusahaan pada fungsi pengawasan risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal yang tepat. Di Indonesia sendiri praktik pengawasan risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RUPS. Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International, 2000 dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2002). Untuk meringankan beban tanggung jawabnya yang begitu luas, Dewan Komisaris dapat mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite pengawas manajemen bentukannya. Komite tersebut diharapkan dapat mendiskusikan kebijakan dan panduan untuk mengatur proses dimana manajemen risiko perusahaan berlangsung (Krus dan Orowitz, 2009).

Fama dan Jensen (1983) dalam Restuningdyah (2010) menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah mekanisme pengendalian risiko yang paling penting. Dewan Komisaris yang efektif harus meyakinkan kevalidan pemilihan metode akuntansi yang dibuat oleh manajemen dan implikasi keuangan untuk setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen. Tetapi, di sini Dewan Komisaris tidak akan berjalan dan bekerja sendiri, ada beberapa komite yang dibuat khusus untuk

membantu kinerja Dewan Komisaris agar lebih efektif, antara lain Komite Audit, Komite Nominasi dan Komite Remunerisasi.

Pembentukan komite-komite tersebut sangatlah penting, mengingat banyak perusahaan yang ingin meningkatkan penerapan *good corporate governance* dalam pengendalian internalnya. Pembentukan komite-komite ini telah dipertegas dan diresmikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Keputusan 117/M-MBU/2002 pasal 14 yang berisi tentang peraturan yang terkait dengan komite-komite ini. Kebijakan tersebut antara lain berisikan :

1. Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
2. Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat mempertimbangkan untuk membentuk komite lain yang terdiri dari Komite Nominasi, Komite Remunerasi, serta Komite Asuransi dan Resiko Usaha guna menunjang pelaksanaan tugas Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Komite Audit bertugas membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

Tiap perusahaan memiliki tipe dan karakteristik tersendiri dalam penerapan manajemen risikonya. Beberapa perusahaan masih mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada Komite Auditnya (Bates dan Leclerc, 2009; Krus dan Orowitz, 2009; COSO, 2009). Tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit itu sendiri adalah untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate*

governance terutama yang berkaitan dengan *disclosure* dan *transparency* serta melaporkan risiko-risiko yang terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan melaporkan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance (KNKG) pada tahun 2002, menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol perusahaan, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut.

Banyak wacana dan literatur yang menyatakan bahwa luasnya keterlibatan Komite Audit tidak menjamin efektivitas kerjanya, dan hal ini dianggap berasal dari bermacam-macam tugas yang harus dipertimbangkan oleh Komite Audit. Padahal tugas pengawasan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai struktur dan operasi perusahaan secara keseluruhan beserta risiko-risiko yang terkait, seperti risiko produk, risiko teknologi, risiko kredit, risiko peraturan, dan risiko yang lain (Bates dan Leclerc, 2009).

Dengan adanya berbagai pertimbangan dan semakin kompleksnya mekanisme suatu pengawasan dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Komite Audit, maka banyak perusahaan berusaha membuat suatu sistem baru dan membentuk suatu komite pengawasan risiko yang terpisah dari Komite Audit yaitu bernama Komite Manajemen Risiko, atau disebut dengan *Risk Management Committee* (RMC). Pemisahan fungsi ini dari Komite Audit bertujuan agar fungsi pengawasan dan manajemen risiko berjalan lebih efektif.

Risk Management Committee dapat didefinisikan sebagai sebuah *sub committee* dari komite pengawas manajemen yang terpisah dari Komite Audit dan berdiri sendiri, yang menyediakan pembelajaran secara khusus mengenai manajemen risiko perusahaan pada level Dewan Komisaris, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level Dewan Komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001 dalam Subramaniam, *et al.* 2009). Dengan berbagai tugas yang harus dilakukan oleh RMC tersebut, maka RMC dapat dikatakan sebagai sumber daya penting bagi Dewan Komisaris dalam hal tanggung jawabnya pada penerapan dan pengawasan manajemen risiko perusahaan. Anggota RMC yang terspesialisasi pada bidang manajemen risiko juga dinilai dapat menguntungkan perusahaan dengan memberikan pemahaman yang lebih kuat akan profil risiko perusahaan kepada Dewan Komisaris (Bates dan Leclerc, 2009).

Hingga beberapa tahun ini, pembentukan RMC telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. *Survey* yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2005 terhadap 200 perusahaan Australia teratas yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* (ASX), menyatakan bahwa lebih dari setengah responden yang digunakan (54%) telah memiliki RMC. Dan dari jumlah tersebut, sebesar 70% tergabung dengan Komite Audit (KPMG, 2005). *Survey corporate governance* pada perusahaan publik oleh *National Association of Corporate Directors* (NACD) pada tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 66,7% perusahaan menyerahkan tugas pengawasan risikonya secara langsung kepada Komite Audit, 23,5% perusahaan melakukan pengawasannya

sendiri oleh dewan (*full board*), dan sisanya menyerahkan tugas pengawasan risikonya kepada RMC. Survey ini juga membuktikan bahwa sebesar 79% responden dengan RMC yang terpisah dari Komite Audit mengaku dapat lebih efektif mengelola risiko dibanding dengan responden yang mendelegasikan tugas pengawasan risiko pada Komite Audit (Bates dan Leclerc, 2009).

Di Indonesia, pembentukan RMC juga mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya suatu kebijakan pemerintah yang mulai memandatkan pembentukan RMC sebagai komite pengawas risiko pada industri finansial perbankan. Akan tetapi, berbeda dengan industri perbankan yang merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) dan diregulasi secara ketat, pembentukan komite pengawas risiko pada industri finansial non perbankan masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum ada regulasi yang secara khusus mengaturnya.

Dalam industri perbankan, istilah komite pengawas manajemen risiko disebut sebagai Komite Pemantau Risiko. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Komite ini terbukti mampu membantu dan meningkatkan kinerja dari Dewan Komisaris. Adapun peran dari Komite Pemantau Risiko ini antara lain :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.* (2009) mengambil sampel sebanyak 200 perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange*, dimana telah dikurangi dengan berbagai perusahaan asing dan perusahaan yang tidak lengkap secara informasi. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendirian atau pembentukan RMC cenderung berada pada perusahaan yang mempunyai CEO yang independen dan ukuran dewan yang lebih besar. Lebih jauh lagi, hasil dari penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa dalam suatu perbandingan antara perusahaan dengan RMC yang tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang terpisah dari Komite Audit, RMC yang terpisah dari Komite Audit mempunyai ukuran dewan yang lebih besar, risiko pelaporan keuangan yang lebih besar dan kompleksitas organisasi yang lebih kecil.

Sementara itu, Chen *et al.*, (2009), dalam penelitiannya, menggunakan beberapa karakteristik perusahaan untuk menjelaskan pembentukan Komite Audit secara sukarela pada perusahaan non-top 500 yang terdaftar dalam *Australian Stock Exchange* (ASX). Hasil penelitian Chen, *et al.* (2009) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan Komite Audit secara sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Yatim (2009) mengemukakan bahwa pendirian RMC cenderung dipengaruhi oleh struktur Komite Audit yang kuat, secara khusus dia menjelaskan bahwa perusahaan dengan Komite Audit yang lebih independen lebih cenderung membentuk Komite Manajemen Risiko secara

terpisah karena dewan pengawas mempunyai tujuan untuk menjaga reputasi mereka sebagai pengawas risiko. Selain itu hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas operasi organisasi dan penggunaan KAP yang tergabung dalam *Big Four* juga berhubungan positif dan signifikan dengan pembentukan RMC.

Sementara itu, Andarini (2010) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, dikemukakan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar secara signifikan berhubungan positif terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC yang terpisah dari Komite Audit (SRMC). Dalam penelitiannya juga diungkapkan bahwa pada kondisi di Indonesia, RMC dan tipe RMC yang terpisah akan lebih banyak dibentuk oleh perusahaan dengan biaya agensi yang lebih tinggi.

Secara umum, hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pembentukan komite secara sukarela berhubungan dengan faktor organisasional dan *corporate governance* tertentu, seperti proporsi komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, *leverage*, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya suatu *research gap*, yaitu apakah laporan keuangan yang tidak diaudit oleh auditor *Big Four* dapat dipastikan tidak memenuhi kualifikasi daripada perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big Four*, sementara itu auditor lokal yang terdapat di Indonesia pun tidak kalah dalam hal kompetensi dan independensinya. Hal ini sangat berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu yang selalu memasukkan variabel auditor *Big Four* dalam variabel independen penelitian. Adapun perbedaan sampel yang digunakan, kondisi dan budaya serta teknik analisis memungkinkan hasil yang berbeda pada penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Subramaniam, *et al.* (2009). Penelitian ini akan menguji hubungan antara karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pendirian atau pembentukan RMC dan jenis RMC yang dibentuk oleh perusahaan, yaitu apakah RMC yang tergabung dengan Komite Audit ataukah RMC yang terpisah dari Komite Audit. Karakteristik Dewan Komisaris diukur dari proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris, sedangkan karakteristik perusahaan dalam penelitian ini diukur dari risiko pelaporan keuangan, proporsi utang jangka panjang dan kompleksitas. Sedangkan untuk variabel kontrol, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan.

Ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Subramaniam, *et al.* (2009), yaitu terletak pada variabel yang diuji dan sampel yang diambil. Perbedaan pertama adalah penelitian ini mengeliminasi tiga variabel yang digunakan dalam penelitian Subramaniam, *et al.* (2009) yaitu *CEO Duality*, reputasi auditor dari *Big Four* dan tipe industri perusahaan. Variabel *CEO Duality* ini dieliminasi karena di Indonesia menganut sistem *two tier*, yaitu adanya pemisahan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris). Jadi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga Dewan Direksi tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris dalam waktu bersamaan, begitu juga sebaliknya. Kemudian penelitian ini juga menghilangkan variabel reputasi auditor dari *Big Four*, karena penelitian ini melihat bahwa auditor lokal yang berada di Indonesia tidak kalah

dalam hal kompetensi dan independensinya jika dibandingkan dengan auditor dari *Big Four*, dan juga dikarenakan hampir semua sampel yang digunakan tidak menggunakan auditor *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya, sehingga dikhawatirkan akan menghasilkan hasil penelitian yang bias jika memasukkan variabel reputasi auditor dari *Big Four*. Sedangkan tipe industri perusahaan dieliminasi karena penelitian ini lebih memfokuskan pada perusahaan finansial non perbankan dan tidak memasukkan perusahaan perbankan dalam penelitian ini.

Perbedaan kedua adalah sampel yang diambil, penelitian Subramaniam, *et al.* (2009) mengambil sampel sebanyak 200 perusahaan teratas yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* (ASX) yang dikurangi dengan perusahaan yang bergerak di bidang *funds* dan *trust*. Sementara itu, penelitian ini mengambil sampel yang berbeda, yaitu perusahaan finansial non perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun pengamatan 2009-2011. Perusahaan finansial perbankan tidak termasuk dalam sampel penelitian ini karena terdapat perbedaan pengertian risiko pada perusahaan jenis ini, seperti risiko kredit dan investasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan berbagai kebijakan dan memandatkan pembentukan RMC pada perusahaan di industri perbankan.

Dasar pemilihan tahun 2009-2011 ini dipilih karena ingin mengetahui kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh perusahaan pasca krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008. Di samping itu, tahun tersebut dipilih karena diharapkan waktu yang lebih dekat dengan pelaksanaan penelitian dapat menggambarkan profil perusahaan terkini. Penelitian ini menarik untuk dilakukan

karena masih jarang ditemukan penelitian serupa di Indonesia. Hingga saat ini juga masih sulit untuk mendapatkan penelitian mengenai RMC secara khusus. Selain itu, dalam beberapa tahun ini isu-isu mengenai risiko dan pengawasan manajemen risiko juga sedang hangat dibicarakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, disebutkan bahwa fungsi pengawasan risiko merupakan fungsi yang sangat penting yang harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan perusahaan pada penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang baik. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu komite yang disebut Komite Manajemen Risiko untuk membantu efektivitas dan efisiensi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas risiko. Adapun rumusan masalah dari latar belakang dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC?
2. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC?
3. Apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC?
4. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC?

5. Apakah proporsi utang jangka panjang berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC?
6. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap pembentukan RMC.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pembentukan RMC.
3. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap pembentukan RMC.
4. Untuk menganalisis pengaruh risiko pelaporan keuangan perusahaan terhadap pembentukan RMC.
5. Untuk menganalisis pengaruh proporsi utang jangka panjang perusahaan terhadap pembentukan RMC.
6. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap pembentukan RMC.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan karakteristik Dewan Komisaris terhadap pembentukan RMC pada perusahaan finansial non perbankan, sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai penelitian *corporate governance* dan manajemen risiko di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*, khususnya dengan membentuk RMC untuk meningkatkan kualitas pengawasan manajemen risiko.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah, dalam menggambarkan secara garis besar deskripsi dan penjelasan dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini ditujukan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah yang telah dibuat.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

1. Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Telaah Pustaka, bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang diusulkan.
3. Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan berbagai variabel penelitian yang digunakan beserta definisi khusus dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan.
4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.
5. Bab V : Penutup, bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, yang mengartikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak di mana salah satu pihak (*principal*) menggunakan pihak lain (*agent*) untuk mengerjakan suatu layanan tertentu untuk kepentingan mereka, dengan melibatkan suatu pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh *agent*.

“A contract under which one or more persons (the principal/s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involve delegating some decisions making authority to the agent.” (Jensen dan Meckling, 1976)

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Masing-masing pihak disini mempunyai kepentingan mereka sendiri-sendiri, dan perbedaan kepentingan ini bisa saja menyebabkan timbulnya *information asymetri* (kesenjangan informasi) antara pemegang saham (*stakeholder*) dan organisasi. Karena perbedaan kepentingan ini jugalah masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri mereka sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan, sedangkan agen menginginkan kepentingannya

diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya.

Ada beberapa kemungkinan konflik yang terjadi dalam hubungan antara *principal* dan *agent* (*agency conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat dari keinginan manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (*principal*) untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang perusahaan. *Agency Conflict* dapat timbul dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. *Moral Hazard*

Moral Hazard adalah perilaku tidak jujur dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Dalam perspektif teori keagenan *Moral Hazard* terjadi akibat konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Bisa saja terjadi ketika manajemen lebih memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

2. *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif.

3. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan

mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap berisiko bagi perusahaannya, walaupun mungkin hal itu bukan pilihan yang terbaik bagi perusahaan.

4. *Time Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi.

Subramaniam, *et al.* (2009) juga menjelaskan secara umum *agent* diasumsikan bertindak berdasarkan kepentingan diri mereka sendiri dan *principal* mempunyai dua kesempatan utama untuk mengurangi berbagai biaya yang timbul dari masalah keagenan tersebut, yaitu :

1. Mengawasi perilaku *agent* dengan mengadopsi mekanisme *auditing* dan tata kelola lainnya yang sesuai dengan kepentingan *agent* dan *principal*.
2. Menyediakan insentif atau dorongan pekerjaan yang menarik kepada *agent* dan mengatur struktur *reward* yang dapat mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*.

Penggunaan Teori Keagenan ini telah banyak digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu khususnya tentang pembentukan komite seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi (Ruigrok *et al.*, 2006; Benz dan Frey, 2007 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Secara umum, komite-komite

tersebut merupakan suatu mekanisme pengawasan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam menyediakan sistem pengawasan yang lebih baik, menuntun untuk menurunkan perilaku oportunistik yang ada dalam manajemen. Komite-komite yang ada tersebut dapat dipastikan akan selalu ada pada situasi di mana *agency cost* tinggi, seperti *leverage* yang tinggi dan kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam, *et al.*, 2009)

Lebih jauh lagi, Subramaniam *et al.* (2009) juga menjelaskan jika Teori Keagenan ini lebih memfokuskan pada motif atas perilaku manusia (yang dimaksud disini adalah prinsipal-agen), secara khusus mengenai *self interest* dan mengesampingkan alasan lain yang mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan.

2.1.2 Risiko

Risiko merupakan sesuatu yang selalu ada dan pasti dihadapi dalam kehidupan manusia. Risiko merupakan suatu cerminan dari ketidakpastian dari apa yang akan terjadi di masa depan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga bagaimanapun juga harus diambil langkah inisiatif untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Risiko juga diyakini dapat menyebabkan kehancuran dari suatu organisasi, sehingga risiko itu penting untuk dikelola dan diperhatikan. Risiko juga pasti tidak dapat dihindari, oleh karena itu pemahaman atas risiko ini merupakan suatu langkah untuk menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi.

Djojosoedarso (2003) mengungkapkan beberapa pengertian mengenai risiko di dalam bukunya, antara lain :

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (William dan Richard).
2. Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin dapat melahirkan peristiwa kerugian (*loss*) (Salim).
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarto)
4. Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Darmawi).
5. Risiko adalah probabilitas suatu hasil atau *outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Darmawi).

Dari berbagai macam definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang sifatnya tidak terduga atau tidak diinginkan.

Demikian juga dalam dunia usaha atau organisasi, risiko merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh organisasi, terutama organisasi yang mempunyai kegiatan yang kompleks yang memerlukan perhatian atas risiko-risiko yang ada, seperti risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis merupakan risiko yang mana perusahaan berasumsi untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif dan menambah suatu nilai bagi para pemegang sahamnya. Sedangkan risiko finansial dapat didefinisikan sebagai berbagai risiko yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan kerugian dalam pasar finansial, seperti kerugian yang

diakibatkan karena pergerakan tingkat bunga atau kegagalan berinvestasi dalam obligasi finansial (Jorion, 2002).

2.1.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah salah satu disiplin yang menjadi populer menjelang akhir abad ke-20. Disiplin ini mengajak kita untuk secara logis, konsisten dan sistematis melakukan pendekatan terhadap ketidakpastian masa depan, sehingga memungkinkan kita untuk secara lebih hati-hati (*prudent*) dan produktif menghindari hal-hal yang tidak berguna karena membuang sumber daya secara tidak perlu dan mencegah hal-hal yang merugikan atau bahkan meraup dan mengejar hal-hal yang bermanfaat (KNKG, 2011).

KNKG (2011) menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik antara lain dapat :

1. Mengurangi kejutan-kejutan yang kurang menyenangkan. Ini dapat diperoleh karena melalui penerapan manajemen risiko yang baik semua hal yang berakibat pada pencapaian sasaran perusahaan telah diidentifikasi sebelumnya dan langkah perlakuan terhadap hal tersebut telah diantisipasi.
2. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin baik. Hal ini diperoleh karena dalam menerapkan manajemen risiko wajib untuk menemukenali para pemangku kepentingan dan harapannya.

3. Meningkatkan reputasi perusahaan, karena komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dan mereka mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi dengan baik.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diidentifikasi dengan baik.
5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien.

Manajemen risiko juga merupakan bagian integral dari suatu praktek bisnis yang baik. Manajemen risiko membawa dasar informal oleh banyak organisasi. Secara umum/tradisional manajemen risiko telah berkembang sebagai disiplin ilmu yang profesional dan teknis di sejumlah bidang seperti keuangan, kesehatan dan keamanan. Meskipun organisasi menghadapi berbagai risiko termasuk risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan informasi (Burlando, 1990; KPMG, 2001).

2.1.4 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Manajemen risiko adalah suatu proses yang sangat kompleks yang meliputi identifikasi, mengatur dan meminimalkan risiko bisnis, baik risiko finansial maupun operasional perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Dan dengan mendirikan RMC dapat memudahkan komite dewan agar lebih efektif

dalam menaksir berbagai ragam halangan dan kesempatan yang dihadapi oleh organisasi.

Pendirian dan pengungkapan dari RMC menunjukkan bahwa komite dewan berusaha untuk berkomitmen dalam mencapai kualitas yang tinggi dalam *corporate governance*. Dengan kata lain, perusahaan yang mendirikan RMC dapat mempunyai kekuatan lebih dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai RMC di dalamnya.

Komite Manajemen Risiko merupakan mekanisme pengawas risiko yang penting bagi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Lebih lanjut, secara umum area tugas dan wewenang RMC adalah :

1. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi.
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi.
3. Menaksir pelaporan keuangan organisasi.
4. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugasnya, anggota dari RMC diharapkan dapat berdiskusi dengan para personel internal perusahaan (Krus dan Orowitz, 2009). Diskusi dilakukan untuk membahas hal-hal mengenai pengimplementasian manajemen risiko, peninjauan ulang kecukupan dan pengelolaan prosedur risiko, dan pelaporan temuan-temuan kepada Dewan Komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009). Seperti yang disebutkan dalam laporan tahunan PT Bakrie & Brothers Tbk. tahun 2008, bahwa :

“Komite manajemen risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kebijakan manajemen risiko yang diterapkan direksi serta memastikan bahwa semua risiko telah diantisipasi dan aset-aset berisiko telah diasuransikan dengan semestinya.”

Selain itu disebutkan pula dalam laporan tahunan bahwa :

“Tim manajemen risiko dan tim audit internal korporasi menyiapkan satu paket laporan kepada direktur utama, mengkoordinasikan dan mendiskusikan rencana hasil kegiatannya kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit perusahaan secara periodik.”

Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan Komite Audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. RMC mempunyai tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit akan membuat anggota komite lebih fokus secara penuh pada berbagai proses dan pelaporan risiko, serta dapat menyediakan kualitas yang lebih baik dalam pengawasan internal daripada suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang digabung dengan Komite Audit. Lebih jauh lagi, pengungkapan yang disediakan oleh RMC yang terpisah dari Komite Audit akan lebih kuat merefleksikan *good corporate governance* dan kualitas pengawasan risiko internal yang lebih baik dibandingkan dengan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

Dengan kata lain, RMC yang tergabung dengan Komite Audit tidak hanya harus melakukan suatu pengawasan terhadap manajemen risiko tetapi juga harus ikut terlibat secara aktif dengan pelaporan laporan keuangan dan mungkin juga

dapat menimbulkan suatu kesalahan karena mempunyai pekerjaan ganda tersebut. Inilah yang menjadi keunggulan efektifitas dan efisiensi dari RMC yang terpisah dari Komite Audit.

Partigan dan McAvoy (2009) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa suatu Komite Manajemen Risiko yang berdiri sendiri mempunyai beberapa keunggulan, antara lain :

1. Membuat suatu budaya atas manajemen risiko dalam perusahaan.
2. Meningkatkan level atas manajemen risiko perusahaan.
3. Menambah keahlian dalam mengelola risiko operasional.
4. Menambah kepatuhan pada pengelolaan risiko tanpa menambah tanggung jawab secara signifikan pada seluruh dewan.
5. Mempermudah dewan dalam mengelola suatu pandangan yang kontinyu pada risiko perusahaan.
6. Meningkatkan proses komunikasi dalam hal yang berkaitan dengan risiko.

Akan tetapi, mempunyai Komite Manajemen Risiko yang berdiri sendiri juga mempunyai beberapa kelemahan , antara lain :

1. Menambah permintaan waktu kinerja dewan.
2. Meningkatkan biaya perusahaan.
3. Meningkatkan potensial atas duplikasi tugas.
4. Dapat terbentur dengan manajemen risiko yang efektif yang ada dalam perusahaan.

5. Adanya kebutuhan untuk mengatur suatu proses dalam menerapkan kebijakan RMC yang berdiri sendiri.

2.1.5 Karakteristik Dewan Komisaris

2.1.5.1 Komisaris Independen

Peraturan mengenai Komisaris Independen di Indonesia sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006. Komisaris Independen ini dapat disebut sebagai komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa pembentukan Komisaris Independen menjadi salah satu hal yang diwajibkan bagi perusahaan publik yang terdaftar di bursa. Dalam peraturan tersebut, perusahaan publik wajib memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Presentase ini dianggap dapat mewakili stakeholder yang dianggap minoritas, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan perlakuan antara stakeholder mayoritas dan minoritas tidak akan terjadi.

Dalam position paper yang dikeluarkan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dari kriteria otoritas *Australian Stock*

Exchange (ASX), dijelaskan tentang kriteria Komisaris Independen sebagai berikut :

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok dan pelanggan.

Subramaniam, *et al.* (2009) menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang memiliki Komisaris Independen secara umum dapat dipastikan mempunyai *agency cost* yang rendah. Hal ini dikarenakan Komisaris

Independen dipandang dapat menyediakan pengawasan dewan yang lebih baik dengan cara melakukan pengawasan independen terhadap Dewan Direksi.

Dalam penelitian Yatim (2009) yang dilakukan dalam perusahaan yang *listing* di Bursa Malaysia menunjukkan bahwa Komisaris Independen menyediakan pengawasan yang lebih baik dan lebih besar atas kebijaksanaan manajemen termasuk kebijakan dalam aktivitas pengambilan risiko. Selanjutnya, para anggota Komisaris Independen lebih cenderung melihat pelayanan dan pengabdian mereka sebagai bentuk usaha mereka dalam meningkatkan reputasi perusahaan mereka.

2.1.5.2 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam *Code of Good Corporate Governance*, ukuran dan jumlah anggota Dewan Komisaris telah diatur sedemikian rupa. Jumlah anggota dewan atau ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Karena tentunya antar perusahaan yang satu dengan yang lain pasti mempunyai kepentingan, ukuran dan kompleksitas mereka masing-masing.

Jumlah anggota yang harus dimiliki Dewan Komisaris sebaiknya lebih besar atau paling tidak sama dengan jumlah anggota Dewan Direksi. Hal ini dikarenakan apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih sedikit dibandingkan Dewan Direksi, maka akan terdapat kemungkinan

anggota Dewan Komisaris mendapat tekanan psikologis jika ada perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut (Indrayati, 2010).

Dalam penelitian Fitdini (2009) dijelaskan bahwa ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari dewan yang besar dalam suatu perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pertukaran keahlian, pikiran dan informasi dalam dewan juga akan lebih luas dan bervariasi. Sedangkan kerugian yang mungkin dapat terjadi adalah dapat meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Jensen, 1983 dalam Fitdini, 2009).

2.1.5.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh Dewan Komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Dewan Direksi dan implementasinya.

Yatim (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Dewan Komisaris yang mengadakan rapat secara teratur dapat mengurangi insiden dalam masalah pelaporan keuangan. Dengan mengadakan rapat secara

teratur, dengan auditor eksternal dan manajemen, maka Dewan Komisaris dapat memperluas informasi dan pengetahuan tentang akuntansi dan permasalahan dalam manajemen risiko.

Perilaku Dewan Komisaris yang telah listing di Bursa US juga menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih sering melakukan rapat secara teratur, sehingga mendapatkan informasi yang lebih baik dalam pengendalian internal dan menanyakan pertanyaan yang lebih baik, serta meningkatkan tugas pengawasan dalam beberapa kurun waktu (Leech, 2005 dalam Yatim, 2009)

2.1.6 Karakteristik Perusahaan

2.1.6.1 Risiko Pelaporan Keuangan

Suatu perusahaan yang mempunyai proporsi piutang dan persediaan lebih besar pada asetnya dilihat mempunyai risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi, karena adanya tingkat ketidakpastian dalam data akuntansi (Korosec dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009).

Subramaniam, *et al.* (2009) juga menambahkan suatu perusahaan yang mempunyai proporsi piutang yang lebih besar, maka risiko yang lebih tinggi atas piutang tak tertagih yang diragukan tersebut akan diakui secara tidak tepat. Karena dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan finansial non perbankan dimana tidak ada rekening persediaan

dalam laporan keuangan maka akun persediaan ini diganti menjadi rekening kredit.

2.1.6.2 Leverage

Leverage merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini dapat digunakan juga untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya jika perusahaan dilikuidasi. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya apabila rasio *leverage* rendah maka risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah.

Menurut Brigham (2006) seberapa jauh perusahaan menggunakan utang (*financial leverage*) akan memiliki 3 implikasi penting, yaitu :

1. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.
2. Kreditor akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan pemegang saham, maka semakin kecil risiko yang dihadapi oleh kreditor.

3. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari pemilik modal akan diperbesar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai tingkat hutang lebih besar dari asetnya atau ekuitasnya, maka perusahaan tersebut lebih berisiko dalam ketidakmampuannya dalam membayar semua pinjaman pokok maupun bunga dalam perekonomian yang memburuk.

2.1.6.3 Kompleksitas

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah semua segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai segmen bisnis yang lebih besar biasanya mempunyai lini produksi, departemen atau strategi pemasaran yang lebih banyak. Sebagai hasilnya, kompleksitas perusahaan yang lebih besar dapat meningkatkan risiko dalam level-level yang berbeda termasuk risiko operasional dan risiko teknologi, yang menuntun terhadap permintaan yang lebih besar dalam pengawasan risiko-risiko tersebut (Subramaniam, *et al.*, 2009).

2.1.6.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, seperti *total*

asset, *log size*, nilai pasar saham, dan sebagainya. Dalam hal ini, ukuran perusahaan yang digunakan adalah *total asset*. Total asset menggambarkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar skala/ukuran perusahaan, begitu juga sebaliknya.

Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *corporate governance* yang lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan beberapa alasan, antara lain perusahaan dimungkinkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada para *stakeholder* dibanding perusahaan kecil karena dasar kepemilikan yang lebih luas, sehingga perusahaan dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif (Andarini, 2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai pembentukan Komite Manajemen Risiko sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun sangat sedikit penelitian ini yang dilakukan pada sektor finansial non perbankan seperti perusahaan asuransi dan leasing. Hal ini mungkin isu mengenai RMC baru muncul akhir-akhir ini dan belum banyak terdapat pengungkapan mengenai penelitian ini.

Subramaniam, *et al.* (2009) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan yang *listing* di *Australian Stock Exchange*, dimana perusahaan asing dan perusahaan dengan informasi yang kurang telah dieliminasi. Penelitian ini

meneliti tentang pengaruh dari karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pendirian RMC di sebuah perusahaan, dan juga untuk mengetahui tipe RMC, apakah RMC tergabung dengan Komite Audit ataukah terpisah dari Komite Audit (SRMC). Karakteristik Dewan Komisaris dalam penelitian ini antara lain proporsi Komisaris Independen, *CEO Duality* dan ukuran dewan. Hasil dari penelitian ini adalah pendirian atau pembentukan RMC cenderung berada pada perusahaan yang mempunyai CEO yang independen dan ukuran dewan yang lebih besar. Lebih jauh lagi, hasil dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa dalam suatu perbandingan antara perusahaan dengan RMC yang tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang terpisah dari Komite Audit, RMC yang terpisah dari Komite Audit mempunyai ukuran dewan yang lebih besar, risiko pelaporan keuangan yang lebih besar dan kompleksitas organisasi yang lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen, *et al.* (2009) menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dan insentif terhadap pembentukan Komite Audit secara sukarela. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 224 perusahaan non-top yang terlisting di ASX pada tahun 2005. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, kepemilikan manajerial, kepemilikan saham yang besar, ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi Komisaris Independen, status CEO, tipe auditor eksternal, dan rasio *fee* non-audit dan audit auditor eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi Komisaris

Independen, CEO independen dengan pembentukan Komite Audit secara sukarela.

Putri Wahyu Andarini (2010) melakukan penelitian terhadap hubungan karakteristik Dewan Komisaris dan perusahaan terhadap pengungkapan RMC pada perusahaan *go public* di Indonesia. Pada penelitian ini pembentukan RMC terpisah dari audit dan berdiri sendiri sebagai variabel dependen. Karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan pembentukan RMC dan RMC yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri (SRMC).

Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.* (2009). Penelitian ini sudah mengeliminasi beberapa variabel terdahulu tersebut dan perubahan sampel perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tempat penelitian di Indonesia.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Subramaniam <i>et al.</i> (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan RMC dan tipe RMC (Tergabung atau Terpisah dari Komite Audit) • Proporsi Komisaris Independen • CEO <i>Duality</i> • Ukuran Dewan • Tipe Auditor Eksternal • Tipe Industri 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> • CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. • CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan pembentukan SRMC dan kompleksitas

		<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas • Risiko Pelaporan Keuangan • <i>Leverage</i> 		berhubungan negatif dengan pembentukan SRMC.
2.	Chen <i>et al.</i> (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Komite Audit secara sukarela • <i>Leverage</i> • Kepemilikan Manajerial • Kepemilikan Saham Yang Besar • Ukuran Perusahaan • Ukuran Dewan • Propors Komisaris Independen Status CEO • Tipe Auditor Eksternal • Rasio <i>Fee</i> Non-Audit dan Audit Auditor Eksternal 	Regresi Logistik	Terdapat hubungan positif dan signifikan antara ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, CEO independen dengan pembentukan Komite Audit secara sukarela.
3.	Yatim (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan RMC • Proporsi Komisaris Independen • CEO Independen • Keahlian Dewan • Kerajinan Dewan 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa proporsi komisaris independen dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari Komite Audit). • Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi juga berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.
4.	Andarini dan Januarti (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan RMC dan tipe RMC (Tergabung atau Terpisah dari Komite Adit) • Proporsi Komisaris Independen Ukuran 	Regresi Logistik	Hanya ukuran perusahaan yang berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC maupun SRMC.

		Dewan <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Auditor Eksternal • Tipe Industri • Kompleksitas • Risiko Pelaporan Keuangan • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan 		
5.	Setyarini (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan RMC dan jenis RMC (Tergabung atau terpisah dari Komite Audit) • Komisaris Independen • Ukuran Dewan • Frekuensi Rapat • Reputasi Auditor • Risiko Pelaporan Keuangan • Kompleksitas • Leverage • Ukuran perusahaan 	Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> • CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. • CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan pembentukan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan pembentukan SRMC.

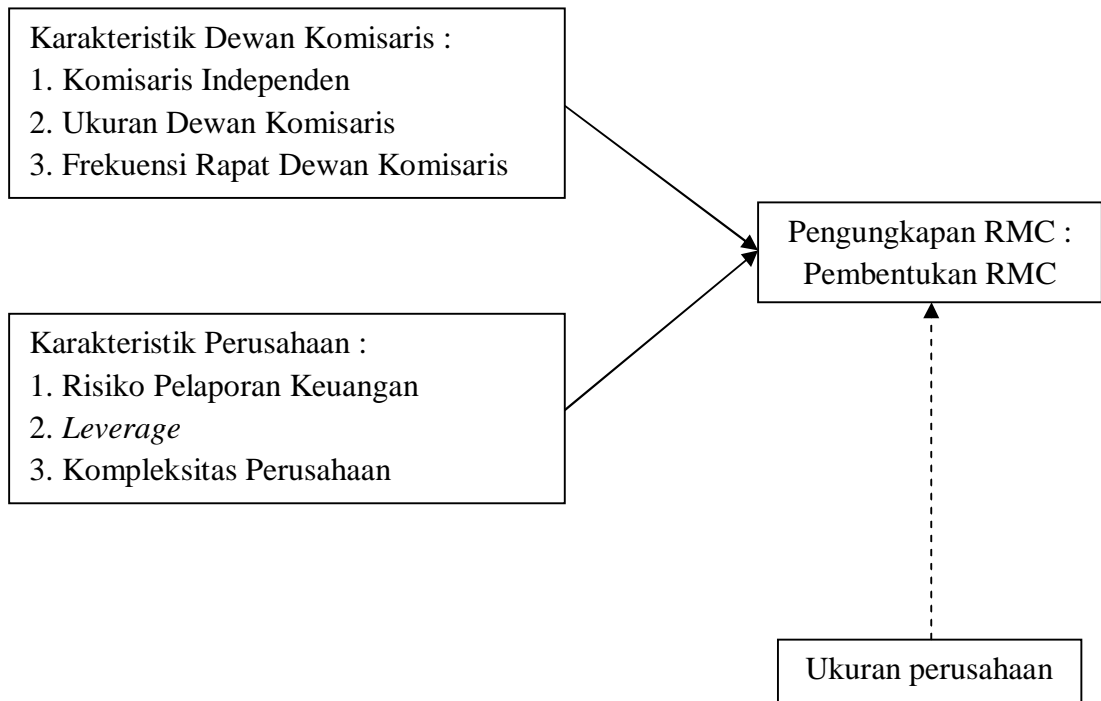
Sumber: review dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Komite Manajemen Risiko merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris selain Komite Audit, Komite Nominasi dan Komite Remunerisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kinerja Dewan Komisaris dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas risiko. Komite Manajemen Risiko sendiri merupakan komite yang berdiri sendiri dan telah mengalami pemisahan fungsi dari Komite Audit. RMC sendiri dapat berfungsi sebagai alat dalam menerapkan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang baik bagi perusahaan dalam mencapai berbagai tujuannya.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran yang dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pendirian RMC dan jenis RMC, yaitu apakah RMC tergabung dengan Komite Audit atau terpisah dan berdiri sendiri (*Separated RMC/SRMC*). Kerangka pertama meneliti pembentukan RMC di suatu perusahaan, sedangkan kerangka kedua meneliti pembentukan SRMC dalam suatu perusahaan, akan tetapi kerangka kedua ini merupakan *subset* dari kerangka pertama, sehingga hanya menerangkan cabang dari kerangka pemikiran pertama. Berdasarkan telaah pustaka dan berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel independen proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris, risiko pelaporan keuangan, proporsi utang jangka panjang dan kompleksitas perusahaan. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran I

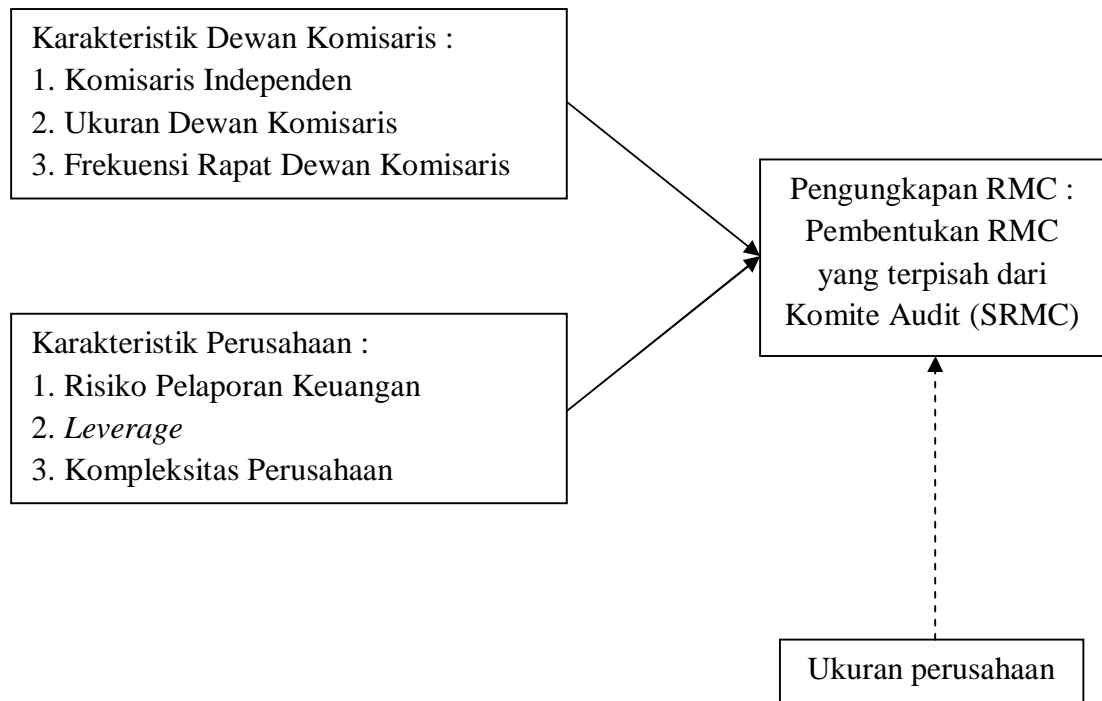


Keterangan :

————— : Variabel Independen

----- : Variabel Kontrol

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran I(a)



Keterangan :

————— : Variabel Independen

----- : Variabel Kontrol

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC

Independensi merupakan hal yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Proporsi Komisaris Independen di dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator independensi dari dewan. Sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009).

Pincus, *et al.* (1989) dalam Subramaniam, *et al.* (2009) menyatakan bahwa pembentukan Komisaris Independen di dalam sebuah dewan akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak berhubungan dengan perusahaan sebagai pegawai, dan mereka juga berperan sebagai perwakilan independen dari kepentingan *shareholders*. Hal ini sangat berkaitan dengan *agency theory*, dimana harus ada suatu pengawasan dari pihak independen terhadap jajaran manajemen yang bertindak selaku *agent* yang menjalankan operasional perusahaan, untuk menghindari tindakan-tindakan yang mungkin hanya bertujuan untuk kepentingan *agent*, sehingga berpotensi merugikan pihak pemegang saham (*principal*). Di samping itu, diharapkan dengan adanya Komisaris Independen, dapat mendukung terwujudnya suatu mekanisme *corporate governance* yang baik.

Perusahaan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, dan dengan membentuk RMC mungkin dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggung jawab pengawasan manajemen risiko dibandingkan dengan proporsi Komisaris

Independen yang rendah. Selain itu, sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih menyukai pembentukan RMC yang berdiri sendiri atau terpisah dari Komite Audit karena pembentukan RMC ini akan bisa lebih berfokus pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko perusahaan.

Penelitian Yatim (2009) memberikan sebuah hasil yaitu sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang besar cenderung untuk membentuk RMC, bahkan RMC yang berdiri sendiri, untuk meningkatkan kemampuan *monitoring* atau pengawasan mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H1(a) : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC

Pembentukan RMC mungkin juga berhubungan dengan ukuran dewan. Ukuran dewan yang besar cenderung dapat menjadi sumber daya yang besar bagi Dewan Komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009). Ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kekuatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Subramaniam, *et al.* (2009), bahwa komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris seperti Komite Audit,

Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat dipastikan akan selalu ada pada situasi dimana *agency cost* tinggi, seperti *leverage* yang tinggi serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar. Hal ini yang juga menjadi dorongan dari Dewan Komisaris untuk membentuk RMC. Sehingga dengan adanya ukuran dewan yang lebih besar, diharapkan dapat membantu kinerja Dewan Komisaris dalam menerapkan manajemen risikonya dan mengawasi kinerja *agent* agar tidak terjadi suatu penyalahan kewenangan yang telah diberikan oleh *principal*.

Ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang ditujukan untuk manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi Dewan Komisaris membentuk RMC, dan tingkat sumber daya yang ditawarkan oleh ukuran dewan yang besar akan membuat Dewan Komisaris lebih menyukai dibentuknya RMC yang berdiri sendiri atau tidak tergabung dengan Komite Audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H2(a) : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

2.4.3 Pengaruh Frekuensi Rapat terhadap Pembentukan RMC

Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi *meeting* Dewan Komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari Dewan Komisaris. Fokus dan perhatian penelitian ini pada *meeting* dewan adalah tepat mengingat frekuensi *meeting* dewan secara potensial akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi *internal control* (seperti RMC) dan menjadikan dewan lebih efektif dalam tugas pengawasannya. Frekuensi dari *meeting* dewan menjadikan sebuah dewan lebih aktif (Ragunandan and Rama dalam Yatim (2009).

Intensitas aktivitas dewan, seperti frekuensi *meeting* ini dapat memberikan kontribusi dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen terhadap berbagai kepentingannya, yang mungkin saja ada suatu tindakan yang dapat merugikan bagi perusahaan maupun *principal*. Pertemuan dewan yang diadakan lebih sering akan memperlihatkan bahwa anggota dewan tersebut terlihat lebih rajin dan hal itu akan menguntungkan bagi *shareholders*. *Meeting* dewan juga merupakan suatu sumber daya dalam meningkatkan keefektifan dari dewan. Oleh karena itu, semakin sering anggota dewan menyelenggarakan rapat, maka akan dapat mendukung terbentuknya suatu komite baru yaitu RMC.

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H3 : Frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H3(a): Frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

2.4.4 Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap Pembentukan RMC

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Pembentukan RMC dan terutama SRMC, akan memfasilitasi pengawasan yang lebih baik dari risiko-risiko tersebut.

Risiko pelaporan keuangan ini sangat berhubungan dengan *agency conflict* yang berpotensi dapat terjadi, yaitu *earning retention*. *Earning retention* adalah keadaan dimana manajemen cenderung mempertahankan tingkat perusahaan yang stabil, yang bertujuan agar kinerja manajemen terlihat bagus. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat piutang usaha dan persediaan yang tinggi, sehingga di tingkat piutang usaha dan persediaan yang tinggi perusahaan cenderung akan membentuk RMC sebagai bentuk *monitoring* terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H4 : Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H4(a) : Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

2.4.5 Pengaruh Leverage terhadap Pembentukan RMC

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan membuat keadaan keuangan perusahaan menjadi memburuk, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya risiko tersebut tentu pembentukan RMC akan menjadi mekanisme yang penting dalam mengawasi risiko tersebut, dan lebih jauh, RMC yang berdiri sendiri akan menjadikan fungsi pengawasan risiko lebih efektif.

Hal ini sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena suatu tingkat *leverage* yang tinggi akan berdampak negatif terhadap para pemegang saham selaku *principal*. Apalagi jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi yang mengharuskan membayar semua hutang perusahaan terlebih dahulu dibandingkan mengembalikan seluruh aset yang telah ditanamkan oleh *principal*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H5 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H5(a) : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

2.4.6 Pengaruh Kompleksitas terhadap Pembentukan RMC

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Kompleksitas yang lebih besar meningkatkan risiko pada tingkat level yang berbeda termasuk risiko operasional dan teknologi yang menuntut terhadap permintaan yang lebih besar untuk mengawasi risiko tersebut (Subramaniam *et al.*, 2009). Semakin besar segmen bisnis yang dimiliki perusahaan maka akan membutuhkan mekanisme manajemen risiko yang efektif. Hal ini akan menyebabkan pembentukan RMC menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan.

Penelitian Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari operasi perusahaan membutuhkan pengawasan yang lebih besar dari RMC yang secara utama berfokus untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan menemukan cara untuk mengurangi risiko tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H6 : Kompleksitas berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H6(a) : Kompleksitas berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembentukan RMC. Pembentukan ini terdiri dari pembentukan RMC yang terpisah (SRMC) atau RMC yang dikombinasikan dengan Komite Audit.

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan. Karakteristik dewan komisaris meliputi proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris. Sedangkan karakteristik perusahaan meliputi risiko pelaporan keuangan, proporsi utang jangka panjang dan kompleksitas perusahaan.

c. Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan. Faktor variabel ini merupakan faktor yang turut mempengaruhi pembentukan RMC, tetapi bukan merupakan fokus utama dari penelitian ini.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Risk Management Committee (RMC) merupakan suatu komite yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus pada pemenuhan standar akuntansi (Krus dan Orowitz, 2009). Pembentukan RMC merupakan salah satu elemen untuk mendukung tercapainya prinsip *good corporate governance*. Dan RMC belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, khususnya terhadap perusahaan finansial non perbankan. Pengukuran variabel dependen ini antara lain melalui :

a. Pembentukan RMC

Dalam penelitian ini pembentukan RMC diklasifikasikan menjadi:

1. Nol, ketika sebuah perusahaan tidak membentuk ataupun mengungkapkan pembentukan dari RMC.
2. RMC yang tergabung, ketika dalam laporan tahunan perusahaan mengungkapkan pembentukan suatu komite di bawah Komite Audit.
3. RMC yang terpisah, ketika dalam laporan tahunan pembentukansebuah komite yang terpisah dari Komite Audit yang secara khusus mengawasi risiko perusahaan yang disebut sebagai RMC.

Dalam penelitian ini, pembentukan RMC diukur dengan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan pembentukan RMC (baik sebagai komite yang terpisah atau komite yang tergabung dengan Komite Audit) diberi angka satu (1), sedangkan diberi angka nol (0) apabila perusahaan tidak mengungkapkan pembentukan RMC dalam laporan tahunannya (Subramaniam, *et al.*, 2009).

b. Pembentukan RMC yang Terpisah Dari Komite Audit dan Berdiri Sendiri (SRMC)

Dalam penelitian ini, pembentukan RMC yang terpisah dari Komite Audit dan berdiri sendiri diukur dengan menggunakan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan pembentukan RMC sebagai komite yang terpisah dari Komite Audit diberi angka satu (1), sedangkan diberi angka nol (0) apabila perusahaan mengungkapkan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit dalam laporan tahunannya (Subramaniam, *et al.*, 2009).

2. Variabel Independen

Karakteristik Dewan Komisaris :

a. Komisaris Independen (NONEXECDIR)

Pembentukan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004). Dalam penelitian ini independensi Dewan Komisaris dinyatakan dalam persentase jumlah anggota Komisaris Independen pada dewan dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009). Persentase ini yang nantinya akan dijadikan sebagai angka absolut untuk mengukur proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris.

$$\text{NONEXECDIR} = \frac{\text{Jumlah anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris}}$$

b. Ukuran Dewan (BOARDSIZE)

Ukuran Dewan Komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004).

Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari Dewan Komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009).

c. Frekuensi Rapat (BOARDMEET)

Keefektifan dari dewan dapat dipengaruhi oleh frekuensi *meeting*, frekuensi rapat yang tinggi dapat menghasilkan monitoring yang lebih baik. Dalam penelitian ini, frekuensi rapat Dewan Komisaris diukur dengan jumlah *meeting* yang diselenggarakan selama satu tahun (Yatim, 2009).

Karakteristik Perusahaan :

d. Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP)

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini risiko pelaporan keuangan diukur dengan menjumlah piutang dan kredit dibagi dengan *total asset* (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{FINREP} = \frac{\text{Piutang Usaha} + \text{Kredit}}{\text{Total Asset}}$$

e. Kompleksitas (BUSSESEGMENT)

Kompleksitas yang lebih besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Kompleksitas dalam penelitian

ini diukur dengan menjumlah segmen bisnis/usaha yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009).

f. *Leverage* (LEV)

Leverage suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi pada suatu waktu. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan membagi total hutang dengan total aset (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

3. Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menjumlah *total asset* yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan finansial non perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2009-2011. Hal ini untuk mengetahui perkembangan pengungkapan RMC pada perusahaan finansial non perbankan selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan finansial non perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2009 hingga 2011.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada periode 2009-2011.
- c. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari tahun 2009 hingga 2011, salah satunya tentang pengungkapan frekuensi rapat Dewan Komisaris.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang

berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI <http://www.idx.co.id> dan pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka dan studi observasi. Metode studi pustaka yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam lingkup penelitian ini. Sedangkan metode studi observasi, yaitu dengan cara memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI di situsnya dan pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Data yang digunakan merupakan data *time series*.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil

pengukuran *mean*, nilai minimal dan maksimal serta standar deviasi semua variabel tersebut.

3.5.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Logistic Regression* (Regresi Logistik). Regresi Logistik tidak memerlukan Uji Normalitas, Heteroskedasitas, dan Uji Asumsi Klasik pada variabel dependennya (Ghozali, 2006). Regresi Logistik sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena variabel dependen dalam penelitian ini *dichotomous* (Subramaniam *et al.*, 2009).

Variabel dependen yang digunakan yaitu pembentukan RMC di dalam perusahaan dan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit atau berdiri sendiri. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) sehingga Regresi Logistik dapat dipakai (Ghozali, 2006).

Persamaan Regresi Logistik dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{logit(RMC)} = & \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \\ & \beta_3 (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{FINREP}) + \beta_5 (\text{LEV}) + \\ & \beta_6 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_7 (\text{SIZE}) + e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{logit}(\text{SRMC}) = & \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \\ & \beta_3 (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{FINREP}) + \beta_5 (\text{LEV}) \\ & + \beta_6 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_7 (\text{SIZE}) + e \end{aligned}$$

Keterangan :

RMC	=	Variabel <i>dummy</i> pembentukan RMC, dimana perusahaan yang memiliki RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
SRMC	=	Variabel <i>dummy</i> pembentukan RMC yang terpisah dari Komite Audit, dimana perusahaan yang memiliki RMC terpisah dari Komite Audit bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
α	=	Konstanta
NONEXECDIR	=	Proporsi Komisaris Independen
BOARDSIZE	=	Ukuran Dewan Komisaris
BOARDMEET	=	Frekuensi rapat Dewan Komisaris
FINREP	=	Risiko pelaporan keuangan diukur dari jumlah piutang dan persediaan dibagi total aset
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas perusahaan

LEVERAGE	=	Kewajiban jangka panjang dibagi dengan aset
SIZE	=	Ukuran perusahaan

Analisis pengujian model regresi logistik :

1. Menilai Model Regresi

Regresi logistik adalah model regresi yang sudah mengalami modifikasi, sehingga karakteristiknya sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu, penentuan signifikansi secara statistik berbeda dalam dari regresi berganda. Kesesuaian model (*goodness of fit*) dapat dilihat dari R^2 ataupun *F test*.

Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai probabilitas (sig.) pada uji *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2006).

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

2. Menilai *Overall Model Fit*

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditujukan dengan *Log likelihood value* (nilai -LL) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai -2LL pada awal (block number = 0), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai - 2LL, pada saat *Block Number* = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai -2LL *Block Number* = 0 > nilai - 2LL *Block Number* = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. *Log likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan *log likelihood* menunjukkan model yang semakin baik.

3. Menguji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol antara satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dalam Regresi Logistik menguji R^2 menggunakan uji Cox & Snell dan Nagelkerke (Ghozali, 2006).

4. Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan *Wald statistic* dan nilai profitabilitas (sig.) dengan cara nilai *Wald statistic* dibandingkan dengan *Chi-square* tabel, sedangkan nilai probabilitas (sig.) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α). Untuk menentukan penerimaan atau penolakan H_0 didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria :

- a. H_0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $> \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a . alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- b. H_0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $< \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a . Alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.